

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran India di Pasifik Selatan secara khusus ditunjukkan dengan kedatangan Narendra Modi ke Fiji dalam tahun pertama kepemimpinannya di tahun 2014. Hal ini dapat diinterpretasikan kemudian bagaimana India memberikan perhatian dan keseriusan lebih terhadap Pasifik Selatan setelah sekian lama. Langkah itu tampaknya dirancang untuk mengisyaratkan keinginan India untuk melanjutkan keterlibatan di Pasifik Selatan secara umum (Wyeth, 2017). Kerjasama India pada era Modi di wilayah Pasifik dimulai dari Fiji. India menjadikan Fiji sebagai titik masuk ke wilayah kepulauan Pasifik. Pada November 2014 Perdana Menteri Modi meresmikan Forum for India - Pacific Islands Cooperation (FIPIC) di Suva, Fiji. Modi bertemu kepala negara dari 14 negara Pasifik Selatan. Dilihat dari aspek ekonomi, India terlibat dalam wilayah pulau Pasifik tidak berbeda dengan keterlibatan negara lain termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Tiongkok. Pertemuan FIPIC kedua berlangsung pada Agustus 2015 di Jaipur, India. Perdana Menteri Modi menyatakan optimismenya untuk memperkuat ikatan India dengan 14 negara di wilayah Pasifik Selatan tersebut. Dalam agenda forum, banyak membicarakan tentang kerja sama dalam di bidang minyak dan alam gas, pertambangan, IT, kesehatan, perikanan, dan penelitian kelautan (Times of India, 2015). Modi juga menawarkan bantuan dalam bidang hidrografi dan pengawasan pantai melalui kehadiran Angkatan Laut India, yang akan membantu negara-negara di Pasifik Selatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang zona maritim dan memperkuat keamanan Zona Ekonomi Eksklusif mereka (Times of India, 2015). Melalui kerja sama seperti itu menjadi lebih mudah bagi India untuk mengirim kapal-kapal angkatan laut ke Samudra Pasifik untuk mengeksplorasi medan laut. Modi juga mengumumkan rencana untuk memasang stasiun pemantauan ruang dan satelit di Fiji, yang akan

membantu India melacak satelitnya secara independen di wilayah Pasifik (Times of India, 2015).

Pertumbuhan ekonomi India yang cepat mungkin dapat memberinya kontrol yang lebih besar terhadap kawasan Pasifik Selatan, tetapi kebangkitan India dalam sektor ekonomi secara global ada dalam bayang-bayang Tiongkok. Terlepas dari perilaku agresif Tiongkok seperti Laut Tiongkok Selatan dan Pasifik Selatan akan menjadi tantangan bagi India karena membuka kemungkinan Tiongkok mendominasi tetangganya, termasuk India. Kekayaan dan pengaruh yang dimiliki Tiongkok terhadap politik internasional juga merupakan tantangan besar, terutama ketika berbenturan dengan kepentingan India. Masalah strategis yang dihadapi India adalah bagaimana mencapai kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga keamanan nasionalnya dalam aspek geopolitik dan geostrategis. India dapat dan memiliki sejumlah opsi strategis untuk dapat dipertimbangkan. Selama dekade terakhir dalam pertumbuhan kekuatan Tiongkok, India terus berusaha menerapkan kebijakan luar negeri untuk dapat mencapai kepentingan dan keamanan nasionalnya.

Dengan zona ekonomi eksklusif yang luas, Kepulauan Pasifik menempati jutaan kilometer persegi lautan dan terleak dalam jalur komunikasi laut yang vital. Beberapa negara di wilayah ini memiliki titik pandang yang ideal untuk proyeksi kekuatan militer. Bagi Tiongkok, yang berupaya memperluas pengaruh strategisnya sendiri di Pasifik, dan mendapatkan akses ke sumber daya alam, Pasifik telah menjadi prioritas penting dalam kebijakan luar negerinya. Beberapa tahun terakhir Tiongkok meningkatkan kehadirannya melalui program bantuan besar-besaran baik dalam aspek sipil maupun militer, dan pengerahan unit angkatan lautnya dalam pengembangan infrastruktur laut di wilayah tersebut (Rajagopalan, 2017). Jelas jika kemudian India menghadapi tantangan strategis yang mendalam sebagai konsekuensi dari kebangkitan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi memberi Tiongkok kekayaan serta pengaruh yang besar. Meski dari segi geopolitik, ancaman Tiongkok ke India tidak lebih besar daripada Pakistan. Namun pertumbuhan kekuatan Tiongkok menimbulkan setidaknya empat

tantangan bagi India, antara lain, pertama, ini merupakan ancaman militer langsung. Kedua, kekuatan Tiongkok dalam institusi internasional mulai dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Nuclear Supplier Group (NSG). Ketiga, kesediaan Tiongkok untuk memainkan peran sebagai penyeimbang India di Asia Selatan dan dalam beberapa kasus, merupakan ancaman militer. Dukungan Tiongkok telah mendukung kemampuan militer Pakistan. Terakhir, ekonomi Tiongkok yang besar memungkinkannya untuk menyebarkan pengaruhnya dunia, yang dapat digunakannya untuk merugikan India. Tiongkok telah menggunakan bantuannya dan kebijakan perdagangan untuk mempromosikan kepentingannya, dan tidak sulit untuk membayangkannya dapat menggunakan hard power untuk menekan aktor lain, terutama negara-negara berkembang, untuk mendukung Tiongkok dalam ketidaksepakatan potensial dengan India (Rajagopalan, 2017). Status Pasifik Selatan sebagai *the arc of instability* membuat sebagian negara enggan berinteraksi dengannya, namun Tiongkok melakukan hal yang sebaliknya. Dalam beberapa hal, Tiongkok memanfaatkan, bahkan menjadi salah satu faktor penyebab terciptanya hubungan dua entitas internasional ini. Penetrasi Tiongkok semakin meningkat setelah Australia dan New Zealand mengisolasi Fiji setelah kudeta tahun 2006 (Dugis, 2015).

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa di masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, India meningkatkan kehadiran di Pasifik Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui latar belakang kerjasama India dibawah pemerintahan Modi untuk menguatkan posisi di Pasifik Selatan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Setelah lama diabaikan dalam politik Internasional, kawasan Pasifik Selatan kini dianggap menjadi kawasan emerging dengan kedatangan negara-negara major power di kawasan tersebut. Selain Amerika dan Australia yang menjadi kekuatan

ekspternal tradisional di kawasan ini, Jepang bersaing dengan Cina untuk mendapatkan pengaruh di seluruh Indo-Pasifik, juga meningkatkannya keterlibatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Sedangkan India menawarkan prospek keseimbangan regional yang lebih besar di Pasifik Selatan dan menawarkan lebih banyak pilihan ekonomi dan politik untuk negara-negara di Pasifik Selatan.

Balasubramanian (2019) memaparkan sejak Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014, kebijakan luar negeri India telah menekankan pada tiga aspek utama yaitu, memperkuat kembali hubungan dengan negara-negara lain, *balancing* dengan negara-negara yang bermusuhan, dan mengamankan keanggotaan di berbagai forum multilateral. Kebijakan luar negerinya menjadi semakin pragmatis bertentangan dengan idealisme yang dipraktikkan sejak lama. Transformasi ini telah mencapai puncaknya di bawah Modi. Pemerintah Modi telah berhasil mengamankan keanggotaan di Shanghai Cooperation Organisation (SCO) bergabung dengan China, Rusia dalam kerja sama regional. Di lain pihak, India juga menjadi bagian dari Trans Pacific Partner untuk bekerja sama dengan AS untuk memastikan Free and Open Indo-Pacific. Terlebih lagi, keikutsertaannya dalam pengelompokan trilateral RIC (Rusia-India-Cina) dan JAI (Jepang-Amerika-India) lagi-lagi membuktikan keterlibatan India dalam keduanya sangat penting dalam mencapai kepentingan dan tujuan masing-masing. Lebih jauh, kebijakan Neighbourhood First, Act East, Link West, dan Connect Central Asia telah berjalan dengan baik. Modi juga telah memulai keterlibatan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, yang India anggap tidak begitu penting sampai beberapa tahun terakhir.

Kekhasan dari strategi kebijakan luar negeri India pada masa dua tahun awal kepemimpinan Narendra Modi adalah dengan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: India menerapkan kekuatan material pada hubungan dengan negara yang berseteru dengannya; hubungan dan preferensi *vis-à-vis* dengan kekuatan utama; dan cara-cara bagaimana ia mengejar upayanya untuk pengakuan dan penerimaan sebagai kekuatan utama. Dua alasan pertama berhubungan langsung dengan

keamanan nasional, sedangkan alasan yang ketiga adalah obsesi bagaimana India menginginkan pengakuan sebagai status utama. Ketiga aspek kebijakan luar negeri India ini membentuk kekhasan interaksinya dengan seluruh dunia. Akan ditunjukkan bahwa, dalam ketiga hal, kebijakan luar negeri India di bawah Modi menjalankan secara berkelanjutan apa yang pemerintah sebelumnya telah lakukan, namun tetap dengan sentuhan khusus khas Modi. Pertama, pendekatan kebijakan luar negeri yang maskulin atau bahkan agresif, keengganan untuk berkompromi dengan musuh yang kuat, serta keinginan untuk menerapkan kekuatan melawan musuh yang lebih lemah. Kedua, pendekatan India menuju major power. Ketiga, tujuan India di luar ranah keamanan ada dalam beberapa tahun terakhir pada keinginan negara untuk berada dalam posisi yang lebih tinggi dalam sistem hierarki (Basrur, 2017). Sedangkan Ogden (2018) menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri India melakukan pendekatan dengan ikut dalam banyak hubungan multilateralisme dan pelaksanaan Act East sebagai upaya pencapaian major power. 'Otonomi Strategis' sebagai salah satu prinsip India terus mendukung kebijakan pemerintah Modi, namun tidak terkait dengan konsep non-alignment. Dengan narasi '*free, open, and inclusive*' Indo-Pasifik membawa konotasi positif untuk mengejar cita-cita India dengan penerapan langkah yang lebih hati-hati. Sejak abad ke-21 pemerintah India di bawah pemerintah Modi telah berusaha melibatkan semua alat kebijakan luar negeri (Prasad, 2018).

India menyambut konsep Indo-Pasifik karena dianggap menyediakan ruang bagi India untuk mengikuti kebijakan otonomi strategisnya. India terus berinteraksi secara fleksibel dan tidak membentuk aliansi manapun. Konsep Indo-Pasifik memungkinkan India untuk menjadi pemangku kepentingan daripada menjadi mitra aliansi AS. Dengan demikian, India dapat mengambil kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional. Di satu sisi India memilih bekerjasama dengan Amerika Serikat pada masalah kebebasan navigasi di perairan internasional termasuk dengan Jepang (Upadhyay, 2014).

Dari beberapa literatur yang ditinjau, dapat dilihat bagaimana India penelitian sebelumnya banyak berfokus terhadap bagaimana Modi mengimplementasikan orientasi kebijakan luar negerinya. Meski tidak sepenuhnya berbeda dengan banyak literatur lainnya, penulis ingin berfokus pada pencapaian major power dengan engage dengan kekuatan lain diluar batas tradisional negara, berikut dengan Pasifik Selatan yang saat ini menjadi kawasan *emerging* dan juga berhubungan dengan *major power* lain yang juga ‘bermain’ di kawasan tersebut. Penulis juga memiliki sedikit pandangan berbeda dalam melihat multi-alignment, dimana penulis melihat *soft balancing* dalam upaya *hedging* yang dilakukan India.

1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan latar belakang atau alasan pengambilan dan penerapan kebijakan negara terkait peningkatan kehadiran India di Pasifik Selatan, penulis menggunakan setidaknya empat kerangka pemikiran. Pertama adalah power dan *rise presence*. Kedua adalah pragmatisme *multi-alignment*.

1.5.1. *Power* dan *Rise Presence*

Berdasarkan penghitungan kekuatan nasional, negara-negara di dunia dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, negara super power, middle power, dan small power (Rothstein, 1968). Kekuatan ini yang di kemudian hari akan melatarbelakangi suatu negara untuk mengambil kebijakan politik yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi dunia internasional (Goldstein, 2007). Semakin kuat kekuatan suatu negara, semakin kuat pula posisi dan pengaruhnya dalam hubungan internasional. Morgenthau (1990) menyebutkan kekuatan berguna untuk mendukung untuk memperluas wilayah kekuasaan (*imperialism*) dan mendapatkan status paling dihormati di dunia (*politics of prestige*), disamping menjaga keseimbangan kekuasaan (*balance of power*); kemudian *influence*, sebagai kemampuan untuk mempengaruhi aktor lain dan dunia internasional pada umumnya; kemudian *authority*, yang memungkinkan suatu aktor hubungan internasional patuh terhadap aktor lain yang lebih berkuasa (Coulombis dan Wofre, 1986). *Rise presence* sendiri masuk dari kerangka power dalam hubungan

Internasional. Melalui kehadiran secara politik dengan ikut serta dalam organisasi regional di kawasan Pasifik Selatan yang memungkinkan dirinya untuk dapat *spreading and gains power* sebagai bagian dari upaya mencapai *major power*.

1.5.2. Pragmatisme Multi-alignment

Pragmatisme merupakan sebuah cara membuat keputusan, menangkap kesempatan dan peluang untuk mencapai hasil praktis dalam jangka pendek (Selezneva, 2002). Pragmatisme didasarkan pada keyakinan bahwa konteks peristiwa menghasilkan solusi, terdapat kecenderungan untuk menunggu perkembangan (Kissinger, 1966). Hal tersebut juga dikarenakan adanya asumsi bahwa penundaan keputusan dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar, paling buruk diperkirakan membutuhkan upaya yang berlipat ganda di kemudian hari. Pragmatisme dalam kebijakan luar negeri sendiri menunjukkan adanya rasionalisasi keputusan negara dalam mengambil kebijakan luar negeri yang kemudian menyesuaikan pandangan dan keputusan terhadap keadaan dunia. Dengan demikian, pragmatisme dalam kebijakan luar negeri menunjukkan adanya pertimbangan fakta dan antisipasi konsekuensi.

Multi-alignment disampaikan Hall (2016) untuk mengidentifikasi pendekatan dalam membuat kebijakan luar negeri sebagai cara terbaik untuk mencapai apa yang mereka anggap sebagai kepentingan dan cita-cita intinya dalam konteks politik global yang semakin tidak pasti (Hall, 2016). Tiga elemen multi-alignment menurut Hall (2016) adalah keanggotaan organisasi regional; *strategic partnership*; dan *hedging*. Regionalisme sendiri ditandai dengan integrasi aktor negara yang kemudian memunculkan tata kelola regional dalam bentuk formal maupun informal dengan mengkaji jaringan regional. Dengan demikian, regionalisme masih berkaitan erat dengan sifat pergeseran politik global dan intensifikasi globalisasi (De Lombaerde et al, 2010). Pendekatan dalam regionalisme baru dapat dilihat dalam dua pendekatan, yaitu *multiple regions*, yang menyatakan bahwa kerjasama regional dapat dibentuk meski dengan negara yang berada di kawasan berbeda. Kemudian *multiple regionalism*, merupakan sebuah konsep kerjasama dengan anggota regionalism yang telah ada sebelumnya

(Shaun, 2010). Rise presence sendiri masuk dari kerangka power dalam hubungan Internasional. Melalui kehadiran secara politik dengan ikut serta dalam organisasi regional di kawasan Pasifik Selatan yang memungkinkan dirinya untuk dapat spreading and gains power sebagai bagian dari upaya mencapai major power. Keanggotaan organisasi dan kemitraan strategis memungkinkan elit politik dan diplomatik sebuah negara untuk terlibat dalam dialog yang lebih teratur dengan kekuatan-kekuatan regional, menyediakan sarana untuk membangun kepercayaan. Kemudian *strategic partnership* memberi akses aktual dan potensial ke pasar, keuangan, teknologi, senjata, intelijen, dan komoditas lain yang tidak dimilikinya saat ini dalam jumlah dan kualitas yang diinginkannya. Lucyna Czazhowska (2013) mengungkapkan bahwa *strategic partnership* merupakan suatu bentuk kerjasama atau aliansi yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan atau kepentingan strategis antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu, bentuk kerjasama yang terbentuk cenderung memiliki sifat jangka panjang. Ieva Gajauskaite (2013) menjelaskan bahwa suatu *strategic partnership* dapat mencerminkan keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk membentuk kerjasama yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan secara tidak langsung juga dapat memperkuat pengaruh suatu pihak di kawasan tertentu. Aspek yang membuat *strategic partnership* menjadi berbeda daripada suatu bentuk aliansi yang biasa adalah *strategic partnership* bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Tentu hal ini akan menjadi opsi dalam membentuk suatu aliansi karena dengan bentuk *strategic partnership*, kedua belah pihak akan memiliki kemungkinan yang besar untuk saling diuntungkan karena bentuk kerjasama ini didasari atas kepentingan yang sama antar kedua-belah pihak, dan melalui persamaan kepentingan tersebut, kedua pihak akan cenderung saling mendukung, terlebih apabila kepentingan tersebut adalah ancaman dari suatu negara yang memiliki kekuatan besar. Kemudian *hedging* memungkinkan sebuah negara menampilkan dirinya sebagai *negara* yang terbuka dalam berbagai macam bentuk diplomasi (Roy, 2005).

1.6. Hipotesis

Peningkatan kehadiran India di Pasifik Selatan pada periode pertama kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi sebagai bentuk kebijakan pragmatisme Modi sebagai upaya mencapai *major power*. Kedua, sebagai bagian dari upaya mengimbangi kehadiran kekuatan *major power* lain di Kawasan Pasifik Selatan.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Operasionalisasi Konseptual

1.7.1.1. Power

Berdasarkan penghitungan kekuatan nasional, negara-negara di dunia dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, negara super power, middle power, dan small power (Rothstein, 1968). Kekuatan ini yang di kemudian hari akan melatarbelakangi suatu negara untuk mengambil kebijakan politik yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi dunia internasional (Goldstein, 2007). Semakin kuat kekuatan suatu negara, semakin kuat pula posisi dan pengaruhnya dalam hubungan internasional. Morgenthau (1990) menyebutkan kekuatan berguna untuk mendukung untuk memperluas wilayah kekuasaan (*imperliasm*) dan mendapatkan status paling dihormati di dunia (*politics of prestige*), disamping menjaga keseimbangan kekuasaan (*balance of power*); kemudian *influence*, sebagai kemampuan untuk mempengaruhi aktor lain dan dunia internasional pada umumnya; kemudian *authority*, yang memungkinkan suatu aktor hubungan internasional patuh terhadap aktor lain yang lebih berkuasa (Coulombis dan Wofre, 1986).

1.7.1.2. Multi-alignment

Multi-alignment sebagai pendekatan yang dikarakterisasi oleh keterlibatan dalam lembaga multilateral regional, penggunaan kemitraan strategis, dan hedging normatif (Hall, 2016). Multi-alignment disampaikan Hall (2016) untuk mengidentifikasi pendekatan dalam membuat kebijakan luar negeri sebagai cara terbaik untuk mencapai apa yang mereka anggap sebagai kepentingan dan cita-cita intinya dalam konteks politik global yang semakin tidak pasti (Hall, 2016).

Tiga elemen multi-alignment menurut Hall (2016) adalah keanggotaan organisasi regional; *strategic partnership*; dan *hedging*. Keanggotaan organisasi dan kemitraan strategis memungkinkan elit politik dan diplomatik sebuah negara untuk terlibat dalam dialog yang lebih teratur dengan kekuatan-kekuatan regional, menyediakan sarana untuk membangun kepercayaan. Kemudian *strategic partnership* memberi akses aktual dan potensial ke pasar, keuangan, teknologi, senjata, intelijen, dan komoditas lain yang tidak dimilikinya saat ini dalam jumlah dan kualitas yang diinginkannya. *Last but not least, hedging* memungkinkan sebuah negara menampilkan dirinya sebagai *negara* yang terbuka dalam berbagai macam bentuk diplomasi.

1.7.1.3. Indirect Balancing

Balancing merupakan upaya mengimbangi kekuatan negara atau aliansi pesaing dengan membangun kekuatan internal atau aliansi sebagai kekuatan eksternal. Walt berpendapat bahwa negara cenderung mengimbangi ancaman yang ditimbulkan negara lain, bukan dari kekuatan yang dimilikinya (Paul et al, 2004). Indirect balancing dimotivasi oleh ancaman di belakang mereka. Walt (1990) menyatakan pemilihan balancing dipilih jika mereka gagal mengekang hegemon potensial sebelum menjadi terlalu kuat. Negara tidak balancing atas kekuatan, tetapi melawan ancaman. Menurut Levy (2004) berpendapat bahwa *balancing* tidak secara otomatis terjadi begitu mereka merasa terancam oleh ancaman potensial tetapi akan terjadi sebagai hasil dari 'kewaspadaan konstan' Mengikuti Walt dan Levy, argumen, ada dua kondisi utama yang menyebabkan negara naik dianggap sebagai ancaman yang jelas dan hadir oleh tetangga mereka, yaitu (1) meningkatnya negara berperilaku agresif terhadap negara lain dan (2) negara berkembang yang menunjukkan kemampuan untuk memproyeksikan kemampuan kekuatannya ke wilayah tetangganya.

1.7.2. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian eksplanatif karena penulis ingin mengetahui mengapa India memutuskan untuk meningkatkan kehadirannya di Pasifik Selatan.

1.7.3. Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan jangkauan waktu mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Dalam rentang waktu ini adalah periode pertama kepemimpinan Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India, serta mulai diberlakukannya kebijakan *Act-east*.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membantu mendapatkan data-data penunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, yang mana data-data yang digunakan merupakan data-data sekunder. Data-data tersebut berasal dari buku, jurnal ilmiah online, artikel, berita, hingga laporan atau pernyataan resmi pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kehadiran India di wilayah Pasifik Selatan.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Untuk dapat menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesis, data-data yang didapat oleh penulis kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Teknik ini berarti bahwa penulis akan menganalisis data-data yang bersifat sekunder, seperti laporan maupun berita.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dalam lima bab: bab I berisikan tentang pendahuluan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian, dimana metode penelitian ini menyangkut operasionalisasi konsep, tipe penelitian, ruang lingkup dan jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan dinamika interaksi antara India dengan Pasifik Selatan. Bab III menjelaskan upaya India mencapai *major power*. Bab IV menjelaskan pengaruh hubungan India dengan *major power* lain di kawasan

sebagai usaha untuk *balancing* terhadap Tiongkok di Pasifik Selatan. Lalu yang terakhir, bab V berisi kesimpulan serta pembuktian hipotesis yang telah diajukan pada awal penelitian.